



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Membuang baju lusuh dewan
Tanggal	: Rabu, 29 September 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 6

Membuang Baju Lusuh Dewan

Umbu TW Pariang

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

DUA Editorial Media Indonesia, Senin (27/9) dan Selasa (28/9), berdiri di panggung keresahan yang sama. Editorial berjudul 'Menjaga Martabat Pimpinan Dewan' (27/9) berupaya mengedarkan nurani para pimpinan DPR yang dirundung 'duku' karena salah satu Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dari Partai Golkar, pada Sabtu (25/9) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu terungkap skandal penanganan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Azis tercatat sebagai orang ketiga (setelah Setya Novanto dan Tanut Kurniawan) di deretan pimpinan DPR yang berurusan dengan rausah.

Tampaknya DPR masih terbenam dalam krisis martabat. Padahal, DPR merupakan institusi penopang demokrasi yang perlu diwarat sungsing dengan pazar wibawa dan integritas. Di titik ini, demokrasi kita sedang dalam ancaman, seperti kupas editorial dengan judul 'Menyehatkan Demokrasi' (28/9), yang diantaranya menggunakan kecenderungan banal elite politik yang sibuk memutus diri dengan segala orientasi keponakan lewat penyakit korupsi.

Korupsi sistemik

Dalam kasus Azis, di sisi kita mengapresiasi KPK yang tengah berupaya 'bangkit' untuk membuktikan diri sebagai institusi yang tetap trengginas dalam memberantas korupsi setelah belakangan ini dihantui skeptisme publik. Namun, pada sisi lain, peristiwa tersebut mencerminkan institusi DPR tak kunjung lelah memanen kritikan dan sinisme publik. Karena, para elitenya yang selalu gagal menjaga murah akibat terserimpung nafsu pementingan diri sendiri (*self dealing*), merasa berkuasa, yang berujung pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Azis memang sudah lama disebut-sebut dalam sejumlah perkara 'uang panas', seperti kasus korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Timur, pada 2012, proyek Kejagung di Komisi III DPR RI, kasus simulator SIM, juga kasus penghapusan *red notice* buron Djoko Tjandra.

Meski demikian, Azis tetap 'menari bebas'. Ada yang bilang, Azis, politikus kelahiran 31 Juli 1970 itu mirip senionya, Setya Novanto. Politisi lucu, yang lilai berselancar di tengah era skandal yang melibatkannya, walaupun pada akhirnya 'kena batu' juga lewat kasus KTP-E senilai Rp2,3 triliun.

Perkata Azis mempertegas begitu sistemik dan 'interistik'nya korupsi dilakukan oleh politisi di ruang parlemen, baik lewat pengaruh internal maupun secara eksternal yang diwakili para pencari rencita dari swasta (Ackerman & Truex, 2013). Kemampuan berkelit Azis dari tuduhan hukum selama ini, misalnya, tidak lepas dari kian kukuhnya episentrum dan jaringan proteksi korupsi di parlemen dengan mengcapitalisasi kuasa dan kewenangan yang dimiliki. Berulangnya skandal korupsi di DPR, dengan peran aktor (politisi, broker, swasta) serta modus operan yang relatif tak jauh berbeda dari waktu ke waktu, sejatinya memperkuat tesis tersebut.

Bahayanya lagi, imunitas korupsi di DPR dari proses hukum, selain karakter politik saling kunci para aktor, juga sering berasal dari produk politik legislasi yang mereka hasilkan sendiri, yang tidak menutup ruang bagi praktik korupsi lewat aruran pembahasan anggaran yang tidaktransparan, hingga pada proses legislasi yang belum maksimal menyerap aspirasi semua elemen masyarakat.

Ini mengingatkan, apa yang diblang Sheldon Woldin dalam *Politics and Vision* (dalam Dagger, 2014:400) sebagai 'terikitsnya hal yang politis' (visi kepribadian dan moralitas

sosial), dengan adanya eksistensi kelompok yang senantiasa mengatasnamakan sosial untuk memajukan kepentingan mereka *on-sich*, dengan menabrak asas-asas kepatutan publik.

Sesuatu yang ironis, mengingat wakil parlemen kita (Fadli Zon), yang merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (IKSAP), selama ini sangat intens mengimbas kampanye melawan korupsi, baik secara global maupun di kawasan Asia, antara lain dengan kesadaran dan aksi imperatif, menghasilkan undang-undang

yang diperlukan untuk memberantas korupsi melalui proses legislasi di parlemen.

Membuka mata batin

Jika kemudian sebagian publik kecewa akan kerja DPR, itu wajar. Mengingat wakil rakyat teristimewa pimpinannya adalah sosok yang diharapkan sudah keyang dengan integritas sebagai modal membangun legitimasi etik-moral mereka di hadapan rakyat.

Di dalam diri wakil rakyat, khususnya pimpinan DPR, dibayangkan melekat kematangan sikap yang diwakili

(Kusumohamidjojo, 2014). Bukan seperti sekarang, DPR yang mestinya mengawasi program bantuan sosial, justru ikut mengorupsiinya. Yang harusnya mengawasi, serta memastikan anggaran pembangunan didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat, malah ikut membancak anggaran demi modal elektoral dan memperkaya diri.

Tak mengherankan jika dalam hasil survei *Global Corruption Barometer* (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia, 51% responden menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia, yang sejalan dengan tren di Asia yang memosisikan parlemen sebagai institusi terkorup. Sigi Indikator Politik Indonesia yang teranyar (17-21 September 2021) juga menempatkan DPR sebagai lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan terendah (50%), jika dibandingkan dengan misalnya TNI (90%), Presiden (82%), Polri (71%).

Deterioritas DPR tersebut tak boleh dihina. Para wakil rakyat di Senayan harus berani mengoyak dan membuang semua 'baju lusuh' ego dan kepentingan prokorupsiya, diganti jubah kerelaan mengorbankan kepentingan (kesenangan) diri. DPR harus menjadi institusi terdepan yang merawat nurani rakyat agar tidak ditikung nafsu pementingan diri dan kekuasaan para politisi. Di sini, peran besar pimpinan DPR sangat dituntut. Kenegarawan dalam berpikir dan bersikap adalah nilai praksis yang mesti turbus di diri pimpinan. Dengan begitu, ekosistem parlemen dan rakyat tidak terus kehilangan keteladan konstruktif dan inspiratif di dalam berdemokrasi.

Tentu saja, kontrol masyarakat terhadap kerja DPR adalah modal utama yang harus terus aktif untuk memastikan DPR tidak dikontaminasi oleh praktik manipulasi, aji mumpung, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat berhak 'mengadil' keras sikap dan kebijakan para wakilnya lewat kritik dan demonstrasi, sejauh sejalan dengan koridor demokrasi.



7